



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucky Firnandy Majanto

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kenly Poluan

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KENLY POLUAN

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

LUCKY FIRNANDY MAJANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
3	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%
7	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
9	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%

10	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
11	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
14	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
15	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft
16	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
17	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan	100%

		dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
18	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/ kab/ kota)
19	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%

Program / Kegiatan Anggaran

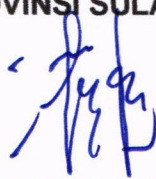
1.	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	1.191.575.000,-
2.	Masa Kampanye Pemilu	Rp.	1.035.713.000,-
3.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	657.633.000,-
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	327.315.000,-
4.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.	20.632.000,-
5.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp.	186.774.000,-
6.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	4.809.000.000,-
7.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	6.923.218.000,-

Manado, 4 Januari 2024

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU
PROVINSI SULAWESI UTARA**


KENLY POLUAN

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU
PROVINSI SULAWESI UTARA**


LUCKY FIRNANDY MAJANTO